

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 47 TAHUN 1999

Endah Tri Winarni ¹⁾

Djoko Kristianto ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ indahtri_winarni@yahoo.com

²⁾ djokokristianto@yahoo.co.id

³⁾ fadjarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the level of financial performance PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo during the fiscal year 2013-2014 based on Kepmendagri No. 47 in 1999. Research methods method using case studies in PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, the types of data the data used was qualitative and quantitative data, the source data used the data of second. Method of data collection used documentation. Technique of data analysis using quantitative descriptive analysis that is doing the financial performance assessment calculation PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo based on the decision of the Minister of the Interior No. 47 in 1999. The research results obtained the conclusion that the assessment of the financial performance at the PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2013 obtained a score of 49 and in 2014 acquired a score of 45 are on the range of value of more than 42, it means including the criteria well. Thus the assessment of financial performance PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo based on decision letter of the Minister of the Interior No. 47 of 1999 on guidelines for the assessment of financial performance TAPS issued by Minister of the Interior based on the decision letter of the Minister of the Interior No. 47 in 1999 entered the category very well.

Keywords: *financial performance, financial ratio*

PENDAHULUAN

Perwujudan dari otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antardaerah dilakukan melalui berbagai arah kebijakan, salah satunya adalah desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah. Implikasi dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mendongkrak sumber-sumber penerimaan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi daerah kemudian dilembagakan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah dalam menjalankan roda usahanya, diamanahkan tiga misi penting, yaitu sebagai pelayan masyarakat (public servant), sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (*agent of development*). BUMD bergerak dalam berbagai sektor, seperti jasa keuangan dan perbankan,

jasa pengelolaan, dan penyediaan air bersih serta berbagai bentuk jasa dan usaha produktif lainnya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Selain bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam hal penyediaan jasa air minum, PDAM juga harus menjalankan misi penting kedaerahan lainnya, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab yang diemban, maka PDAM harus bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Namun, realitas hari ini berkata lain. Kinerja sebagian besar perusahaan daerah/badan usaha milik daerah khususnya PDAM yang masih rendah menunjukkan bahwa ada PDAM kurang optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan daerah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseriusan para stakeholder perusahaan daerah menjalankan unit bisnisnya. Bentuk ketidakseriusan para stakeholder PDAM antara lain seperti tunggakan utang jangka panjang yang tidak jelas penyelesaiannya, tingkat kehilangan/kebocoran air yang masih tinggi, kesulitan air baku, pemberlakuan tarif yang tidak *full cost recovery*, SDM yang tidak kompeten, infrastruktur yang minim, serta biaya operasional yang tinggi seperti biaya bahan kimia, BBM dan tarif dasar listrik. Ketidakseriusan ini berakibat pada inefisiensi kerja di berbagai aspek, seperti aspek keuangan, aspek operasional, maupun aspek administrasi.

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM, yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun data dari PDAM. Setiap tahun, BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut.

Laporan kinerja PDAM di Indonesia periode tahun 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga 2010. Berikut ini adalah daftar data kinerja PDAM seluruh Indonesia berdasarkan data yang masuk ke Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa pada periode 2011 perbandingan jumlah PDAM yang dinyatakan kurang sehat (38% atau 105 PDAM) dan sakit (21% atau 86 PDAM) masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan PDAM yang dinyatakan sehat (41% atau 144 PDAM)—sekalipun kecenderungan PDAM yang dinyatakan sehat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2006 = 44 PDAM, 2007 = 79 PDAM, 2008 = 89 PDAM, 2009 = 103 PDAM, 2010 = 142 PDAM, dan 2011 = 144 PDAM). Oleh karena itu, diperlukan segala upaya perbaikan dan penyempurnaan pada berbagai aspek oleh seluruh PDAM (PDAM Sukoharjo, 2015).

Kebutuhan masyarakat akan transparansi kinerja BUMD, khususnya PDAM, dapat terjawab lewat laporan keuangan yang terbit setiap akhir tahun buku. Dalam hal ini, laporan keuangan menjadi instrumen pertanggungjawaban kinerja, khususnya aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan faktor krusial yang menunjang optimalnya pelayanan PDAM kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan analisis kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat keberhasilan PDAM. Dengan kata lain, kinerja keuangan merupakan cerminan dari baik buruknya kinerja teknis dan kinerja manajemen/ administrasi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat keberhasilan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo. Salah satu indikator pengukuran kinerja PDAM dalam Kepmendagri tersebut adalah aspek keuangan. Analisis aspek keuangan ini meliputi proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Komponen-komponen yang harus disajikan untuk menganalisis aspek keuangan berupa jumlah pendapatan, baik dari pendapatan

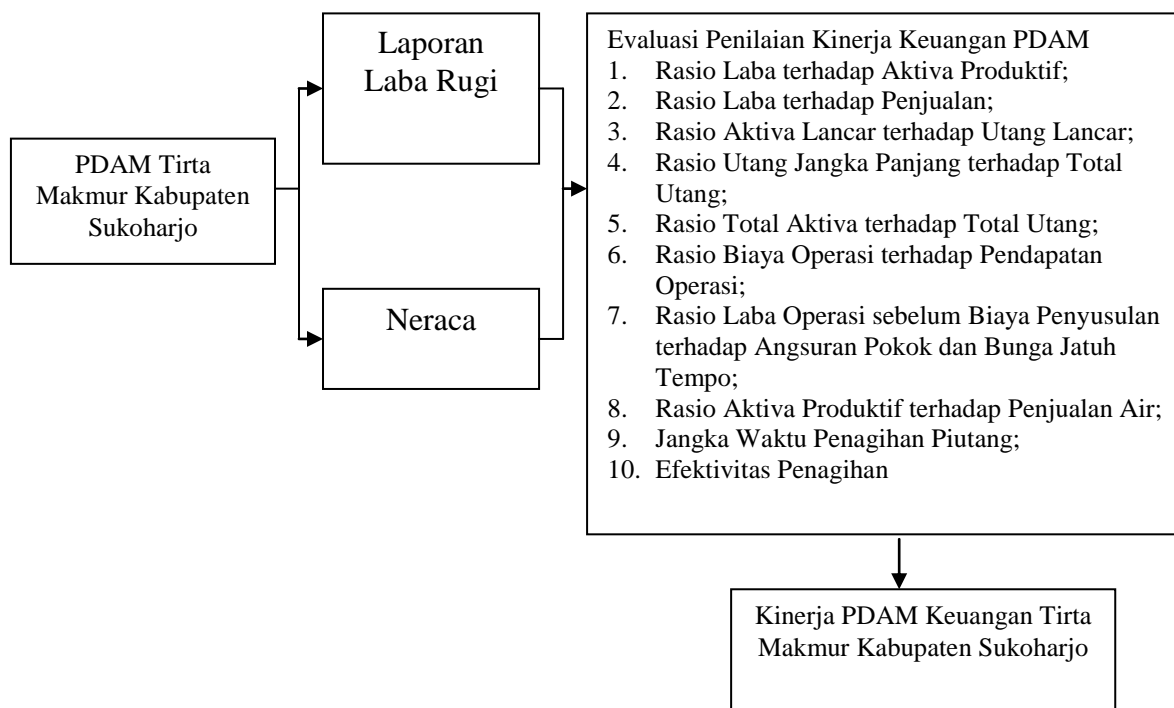
operasional dan non operasional, biaya operasi, laba rugi sebelum penyusutan, biaya penyusutan, biaya pajak, laba rugi bersih, jumlah kas, jumlah piutang, aset tetap, akumulasi penyusutan, utang jangka panjang, modal/penyertaan serta kumulatif laba/rugi.

Penelitian mengenai kinerja keuangan PDAM pernah dilakukan oleh Charles Munoz Hasyboni (2013) meneliti tentang Evaluasi Kinerja Aspek Keuangan Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 Pada PDAM Kota Samarinda Periode 2008-2011. Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1), tentang tingkat keberhasilan PDAM, PDAM Kota Samarinda di tahun 2008 memiliki nilai kinerja aspek keuangan sebesar 51,67 dengan katagori “cukup”, di tahun 2009 memiliki nilai kinerja aspek keuangan 95,00 dengan katagori “Baik sekali”, di tahun 2010 memiliki nilai kinerja aspek keuangan 75,00 dengan katagori “Baik”, dan di tahun 2011 memiliki nilai kinerja aspek keuangan 71,67 dengan katagori “Baik”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles Munoz Hasyboni (2013) terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan, dalam penelitian ini sebagai objek penelitiannya adalah PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan tahun pengamatan yaitu tahun 2013-2014.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo selama tahun buku 2013-2014 berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999.

Kerangka Pemikiran

Penyusunan skripsi ini memerlukan adanya suatu kerangka pemikiran yang jelas, agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat lebih terarah. Adapun skema kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Definisi Operasional Variabel

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013-2014. Keadaan ini ditunjukkan dengan sejumlah harta yang disebut aktiva dan sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut yang disebut pasiva, yang diukur dalam satuan rupiah.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013-2014, yang diukur dalam satuan rupiah.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan PDAM adalah kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dalam menghasilkan laba dalam suatu periode, yang diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, yang meliputi: Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif; Rasio Laba terhadap Penjualan; Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar; Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang; Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang; Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi; Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo; Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air; Jangka Waktu Penagihan Piutang; dan Efektivitas Penagihan, yang diukur dalam persentase.

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah: Tingkat kinerja keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo selama tahun buku 2013-2014 berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999, masuk kategori baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dengan pertimbangan data yang diperlukan dalam penelitian tersedia serta diperolehnya izin penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan penilaian kinerja keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan PDAM Kabupaten Sukoharjo selama periode 2013-2014, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan rasio sebagai berikut:

Tabel 1: Rekapitulasi Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014

No.	Rasio Keuangan	Nilai Rasio		Bobot Penilaian	
		2013	2014	2013	2014
1.	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	47,28%	55,24%	5	5
2.	Rasio Laba terhadap Penjualan	15,81%	13,73%	4	4
3.	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	15,30	41,68	5	4
4.	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang	0	0,42	5	5
5.	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	129,69	266,68	5	5
6.	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	0,40	0,87	5	2
7.	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	0	0	5	5
8.	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	0,38	0,29	5	5
9.	Jangka Waktu Penagihan Piutang	30,42	41,50	5	5
10.	Efektivitas Penagihan	96,41%	96,94%	5	5
Jumlah				49	45

Sumber: Data Sekunder diolah 2015

Kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari 10 rasio keuangan dan dua rasio perbaikan indikator berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999.

1. Rasio laba terhadap aktiva produktif

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa PDAM menunjukkan kinerja yang cukup baik, jika dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba dari jumlah aset produktif yang dikelola. Pada tahun 2013 PDAM laba sebesar Rp 2.718.518.188,59 sehingga rasio laba sebesar 47,28%. Pada tahun 2014 laba yang diperoleh sebesar Rp 2.750.205.596,20 sehingga rasio laba terhadap aktiva produktif di tahun 2014 meningkat menjadi 55,24%. Terjadinya kenaikan rasio pada tahun 2014 disebabkan naiknya laba yang diperoleh PDAM Kabupaten Sukoharjo atau dapat pula diartikan Rp 1,00 laba yang dihasilkan pada tahun 2013 merupakan kontribusi dari aktiva produktif sebesar Rp 55,24.

2. Rasio Laba terhadap Penjualan

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2013 rasio laba terhadap penjualan sebesar 15,81%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 13,73%. Penurunan laba pada rasio ini disebabkan oleh menurunnya penjualan air.

3. Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar

Berdasarkan hasil analisis data, rasio aktiva lancar terhadap utang lancar pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan secara signifikan, kondisi ini menunjukkan dalam 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2014, PDAM memiliki kinerja yang baik dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kegiatan aktivitas operasi perusahaan. Terjadinya peningkatan rasio ditahun 2014 disebabkan karena meningkatnya utang lancar, sehingga rasio aktiva lancar terhadap utang lancar menjadi pada tahun 2014 sebesar 41,69 dengan perolehan nilai 4. Jadi dapat di artikan bahwa dalam 2 tahun terakhir PDAM telah mampu memanfaatkan aset/aktiva lancarnya secara maksimal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

4. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas

Berdasarkan hasil analisis rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2014 telah terjadi peningkatan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, di tahun 2013 sebesar 0% karena PDAM tidak memiliki utang jangka panjang, pada tahun 2014 rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas sebesar 0,42. Walaupun ada peningkatan tetapi penilaian rasio ini masih mendapat nilai 5 atau dapat dikategorikan sempurna.

5. Rasio total aktiva terhadap total utang

Berdasarkan hasil analisis data pada rasio total aktiva terhadap total utang, terlihat adanya peningkatan yaitu pada tahun 2013 rasio yang dicapai 129,69, kemudian pada tahun 2014 mencapai 266,68. PDAM Kabupaten Sukoharjo sudah mulai mampu mengoptimalkan seluruh penggunaan aset-aset perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal, yang berdampak langsung terhadap utang perusahaan yang semakin menurun sehingga dapat membantu mengurangi pinjaman kepada pemerintah.

6. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi

Berdasarkan hasil rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, pada tahun 2013 sebesar 0,40 mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,87. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diterima, besarnya biaya administrasi dan umum serta biaya transmisi dan distribusi yang membuat PDAM harus mengeluarkan banyak biaya agar kegiatan operasional perusahaan terus berjalan.

7. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo

Berdasarkan hasil analisis rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, menunjukkan peningkatan rasio pada tahun 2013 sebesar 0 dan pada tahun 2014 juga sebesar 0, hal tersebut karena PDAM Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki angsuran pinjaman, sehingga dapat dikatakan utang jangka panjang jatuh tempo PDAM telah lunas, dan hal tersebut berdampak baik pada rasio perolehan bagi PDAM.

8. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air

Berdasarkan hasil data rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, rasio ditahun 2013 menunjukkan 0,38 dan pada tahun 2014 sebesar 0,29. Dapat diartikan bahwa di tahun 2014, setiap Rp 1,00 hasil penjualan air merupakan kontribusi dari Rp 29,00 aktiva produktif yang dimiliki pada tahun tersebut, kemudian di tahun-tahun berikutnya manajemen PDAM mampu mendayagunakan aset lebih baik lagi, sehingga semakin optimallah penggunaan aset produktif oleh pihak PDAM Kabupaten Sukoharjo.

9. Jangka waktu penagihan piutang

Berdasarkan hasil analisis rasio jangka waktu penagihan piutang, terlihat di tahun 2013 sebesar 30,42 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 41,50. Hal tersebut menggambarkan bahwa jangka waktu penagihan piutang pada tahun 2013 selama 30 hari dan pada tahun 2014 jangka waktu penagihan piutang rata-rata selama 41 hari.

10. Efektifitas penagihan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai efektivitas penagihan, pada tahun 2013 efektifitas penagihan yaitu sebesar 96,41% dan meningkat ditahun 2014 menjadi 96,94%.

Dilihat dari tingkat efektivitas penagihan yang telah dicapai oleh PDAM dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tentunya dipengaruhi adanya peraturan denda apabila terlambat melakukan pembayaran rekening air dan disertai dengan pemutusan sambungan aliran air oleh pihak PDAM apabila pembayaran rekening air menunggak sampai 3 bulan, berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban para pelanggan untuk tertib administrasi dalam pembayaran rekening air.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penilaian kinerja keuangan pada PDAM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 diperoleh skor sebesar 49 dan pada tahun 2014 diperoleh skor 45 berada pada rentang nilai lebih dari 42, berarti termasuk kriteria baik sekali. Dengan demikian penilaian kinerja keuangan PDAM Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan PDAM yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang didasarkan pada Surat keputusan Mendagri No 47 tahun 1999 masuk kategori sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bambang Riyanto, 2010, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Charles Munoz Hasyboni, 2013, "Evaluasi Kinerja Aspek Keuangan Berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 pada PDAM Kota Samarinda Periode 2008-2011", *eJournal Administrasi Bisnis*, Volume 1 No. 1 Tahun 2013.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2000, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Per 1 Oktober 2004, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI, Jakarta.
- Irhan Fahmi, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- Jumingan, 2006, *Analisa Laporan Keuangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lanto Miriatin Amali, 2014, "Analisis Kinerja Keuangan Pada (PDAM) Kota Gorontalo", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 05, No. 01 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, 2002, *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Keempat, Prenhallindo, Jakarta.
- Sutrisno, 2009, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta.
- S. Munawir, 2010, *Analisis Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, 2009, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahyunan, 2004, *Manajemen Keuangan I (Perencanaan, Analisis dan. Pengendalian Keuangan)*, USU Press, Medan.